

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT.RajaGarafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. *Profil Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar*. Makassar.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. 2013. *Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013*.
- Hadjon, Pihilipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Hani Handoko. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT. Rafika. Jakarta.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung.
- Manullang, M. 1977. *Dasar-dasar Management*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. S Wibisono. 2005. *Pengantar Ilmu Kelautan*. Grasindo. Yogyakarta.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo. Jakarta. 2007.

- Patittingi, Farida. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Puluhulawa, Fenti U. 2013. *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum*. Interpena. Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, S.P., 1990, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, Jakarta.
- Supriharyono. 2002. *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*. Bandung.
- Sarwoto. 1997. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Victor M. Situmorang. Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahid, M. Yunus. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. KENCANA. Jakarta.

B. Karya Ilmiah :

- Asykuri ibn Chamin(ed). 2003. *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Diktilitbang PP Muhammadiyah-LP3 UMY-The Asia Foundation. Yogyakarta.
- Amin. 2009. *Terumbu Karang; Aset Yang Terancam (Akar Masalah dan Alternatif Solusi Penyelamatannya)*. Jurnal REGION, Vol 1 No.2.
- Akib, Muhammad. 2012. *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Media Hukum Vol.19 No.2.
- Aspan, Zulkifli. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)*. Jurnal Hukum Lingkungan. Makassar.

- Abdulah, Sri Sendra. 2015. *Pengawasan Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Bahar, Ahmad. 2013. *Pedoman Survei Laut*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Blake Armstrong, *Maintaining the World's Marine Biodiversity: Using the Endangered Species Act to Stop the Climate Change Induced Loss of Coral Reefs*, Hasting West-Nortwest Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 18, Issue 2, Summer 2012.
- Faizal Kasim. 2011. *Pelestarian Terumbu Karang untuk Pembangunan Kelautan Daerah Berkelanjutan*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Farhan, dkk. 2018. Analisis tutupan ekosistem terumbu karang di pulau barrang lombo menggunakan citra sentinel 2. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fadillah, Siti Afifa. 2019. *Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Hadi, Tri Aryono, dkk. 2018 . *Status Terumbu Karang Indonesia 2018*. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Irwansyah. 2015. *Hak Atas Lingkungan*. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus. USAID. the United States Government. Asia Foundation and Kemitraan.
- Jompa, Jamaluddin. 2012. *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut*. Jurnal Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. Makassar.
- Johan, O., Hadie, W., Saputra, A., Haryadi, J., dan Listyanto, N. 2007. *Budi Daya Karang Hias Mendukung Perdangan Karang Hias Yang Berkesinambungan*. Jurnal Riset Akuakultur.
- Kholish, M. N. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Studi di Gili Air)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Moll H. 1983. *Zonation & diversity of scleractinian on reefs of South Sulawesi*. Indonesia. Thesis. Netherland: Leiden University.

- Mary Gray Davidson, *Protecting Coral Reefs: The Principal National And International Legal Instruments*, Harvard Environmental Law Review, Vo. 26, Issue 2, 2002.
- Mina, Risno. 2016. *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup*. Universitas Muhammadiyah Luwuk. Luwuk Binggai.
- Nur, Sri Susyanti. 2010. *Hak Guna Laut Dalam Usaha Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Suatu Kajian Hukum Agraria Kelautan)*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Novela, Harlita. 2019. *Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Terumbu Karang Di Pulau Ujung Sebagai Objek Pariwisata Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Andalas. Padang.
- Pratiwi, Rizqa Audian. 2012. *Evaluasi Kebijakan Pelestarian Terumbu Karang di Polewali Mandar Tahun 2012*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Pasanea, Yoris Eric. 2013. *Kondisi Terumbu Karang dan Penyusunan Konsep Strategis Pengawasan Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rani, Chair. 2003. *Perikanan dan Terumbu Karang yang rusak: Bagaimana Mengelolanya?*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sunarto. 2006. *Keanekaragaman Hayati dan Degradasi Ekosistem Terumbu Karang*. Karya Ilmiah. Universitas Padjajaran.
- Sudiono, Gatot. 2008. *Analisis Pengelolaan Terumbu Karang Pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pulau Randayan dan Sekitarnya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sari, Intan Permata. 2016. *Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Universitas Sumatera Utara.
- Silalahi, Meitrivane. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Perairan Raja Ampat oleh kapal MV CALEDONIAN SKY Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Tesis. Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Wladnyana, Ngruah N., dkk. 2013. *Jurnal Segara Vol.9*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber DayaLaut dan Pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yusuf, S., Yassir, I. dan Paulangan,. 2006. *Muatan Lokal Terumbu Karang Sekolah Menengah Umum Kabupaten Biak*.

Yusnita. 2014. *Kajian Potensi Dampak Wisata Bahari Terhadap Terumbu Karang di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu*. Tesis. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Intitut Pertanian Bogor.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Di Kawasan Konserasi Perairan

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Internet

- Kurniati. 2018. *Profil Kelurahan Kecamatan Barrang Lompo*. Diakses tanggal 15 Januari 2020, dari <http://sangkarrang.com/kelurahan/barrang-lompo/>.
- Otonomi Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dari <http://dodynurandriyan.blogspot.com/2009/03/otonomi-daerah-dan-pengelolaan.html>.
- Profil Kota Makassar. Diakses tanggal 18-09-2019, dari <http://pesisircelebes.blogspot.com/2014/03/profil-kota-makassar.html>.
- Rehabilitasi Terumbu Karang di Pulau Badi. Diakses tanggal 15 September 2019, dari https://makassar.consulate.gov.au/mksr/Blog_15_b.html.
- Rehabilitasi Terumbu Karang Pulau Bontosua, dari <https://makassar.sindonews.com/read/8400/1/cerita-foto-rehabilitasi-terumbu-karang-pulau-bontosua-1524657883>.
- Rangkuman Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dari <https://www.hukumproperti.com/rangkuman-peraturan/rangkuman-undang-%E2%80%93-undang-nomor-27-tahun-2007-tentang-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-%E2%80%93-pulau-kecil/>.
- Status Terkini Terumbu Karang Indonesia 2018, dari <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi:-status--terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410>.
- Terumbu Karang Pesisir Makassar Rusak Parah. Dampak Reklamasi?, dari <https://www.mongabay.co.id/2016/01/15/terumbu-karang-pesisir-makassar-rusak-parah-dampak-reklamasi/>.
- Wahyu Chandra. *Kewenangan ditarik ke Provinsi, Efektifitas pengawasan di laut diragukan*. Diakses tanggal 15 Januari 2020, dari <https://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektivitas-pengawasan-di-laut-diragukan/>.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1049/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Walikota Makassar
2. Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan PPs Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 9917/UN4.5.1/PT.01.04/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AHMAD PARENRENGI ASHARI
Nomor Pokok : B012171034
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Februari s/d 19 April 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Februari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan PPs Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar.
2. Peninggal.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN**

Jl. Urip Sumohardjo No. 8 (Gabungan Dinas) Makassar

Telp. +62411-854920 Fax +62411-854759

Email : dpp.mks@gmail.com website:dpp.makassar.go.id

Yang Bertanda Tangan :

Nama : Laode Zamiluddin. SE,MM
NIP : 19740527 20101 1 011
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Menerangkan Bahwa :

Nama : **AHMAD PARENRENGI ASHARI**
NIM/ Jurusan : B012171034 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10 Makassar
Judul : "IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP KERUSAKAN
TERUMBU KARANG DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR".

Benar telah melakukan penelitian dalam Rangka Penyusunan Tesis Pada Dinas
Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dari Tanggal 09-11 Maret 2020.

Makassar, 11 Maret 2020

An.Kepala Dinas
Kasubag. Umum dan Kepegawaian





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 09 Maret 2020

K e p a d a

Nomor : 070 / 533 -II/BKBP/III/2020
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PERIKANAN
DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1049/S.01/PTSP/2020 Tanggal 18 Februari 2020, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : AHMAD PARENRENGI ASHARI
NIM / Jurusan : B012171034 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Tesis** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **09 Maret s/d 19 April 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan PPs Fak.Hukum UNHAS Makassar di Makassar;